



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 862/V/2015

II/MEI 2015



KUNJUNGAN KERJA KOMISI DPR RI KE BERBAGAI DAERAH

Papua Miliki Potensi Wisata Sangat Menarik



Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau obyek wisata dan hasil kerajinan ekonomi kreatif masyarakat di Pulau Esei Besar

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Sofyan Tan menilai Provinsi Papua memiliki potensi pariwisata yang baik karena ditunjang oleh kondisi alam yang indah serta kreatifitas masyarakat Papua itu sendiri.

Hal itu disampaikan Sofyan Tan ke-

pada Parlemenaria d Kota Jayapura, Papua, Rabu (29/4), disela kunjungan Komisi X DPR ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, objek wisata Danau Sentani, dan ke tempat pembuatan kerajinan tangan khas Papua.

Menurut Sofyan Tan, potensi alam dan kreatifitas masyarakat Papua bisa menjadi daya tarik terhadap turis mancanegara maupun turis domestik. “Alam Papua bisa menjadi wisata yang sangat menarik, karena ciri khas alam yang tidak ditemukan di daerah lain,” katanya.

Ia juga mengomentari soal keindahan alam Danau Sentani yang menurutnya sangat baik, hanya tingkat pengelolaan festival Danau Sentani yang perlu terus dikembangkan guna menarik sektor pariwisata.

Seperti diketahui, Danau Sentani membentang dari Kota Jayapura hingga Kabupaten Jayapura. Danau ini memiliki luas kurang lebih 9.360 hektar. Danau ini merupakan danau terbesar di Papua. Keistimewaan tempat wisata Danau Sentani adalah adanya pulau-pulau kecil yang eksotis berada di tengah tengah danau. Adanya pulau-pulau kecil ini membuat ciri khas Danau Sentani yang tak dimiliki oleh banyak danau di Indonesia.(nt) foto: nita/parle/hr

Ketua DPR Hadiri Peresmian IPC Corporate University

Ketua DPR RI Setya Novanto, didampingi Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena dan Anggota Komisi IV Robert Joppy Kardinal, turut menghadiri peresmian IPC Corporate University, di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/05/15). Kampus yang merupakan program Pelabuhan Indonesia II ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan itu, Novanto menyatakan, pembangunan kampus ini merupakan keberhasilan dari kinerja yang selama ini sudah dijalankan.

“Melihat kesuksesan yang luar biasa ini, nanti apa yang dicita-citakan jadi tol laut akhirnya terwujud. Tentu ini

menjadi contoh kinerja yang sudah berhasil,” kata Politisi F-Golkar ini, usai acara.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyebutkan, keberadaan IPC Corporate University bukan hanya untuk pelatihan dan pendidikan, melainkan juga pusat pengetahuan di bidang kemaritiman.

“Nantinya di sini (IPC) akan dibangun gedung yang bisa mengontrol sistem pelabuhan kita. Saya bayangkan bahwa kapal yang bergerak dari Aceh atau Sumatera Utara mau ke Tanjung Priok, sudah diketahui dari sini, tidak harus gedung atau bangunan sistem itu di pelabuhan. Jadi tahu kapan



Presiden Joko Widodo didampingi Pimpinan Lembaga Tinggi Negara melihat maket gedung IPC Corporate University

sampai, jam berapa, menit berapa, detik berapa sampai di Tanjung Priok, membawa kontainer berapa, apa yang ingin dinaikkan,” katanya.

Jika sistem itu dibangun dengan baik, tambah Presiden Jokowi, maka biaya transportasi akan turun hingga setengah harga, dan memberi dampak kepada penurunan semua harga barang. Pasalnya, biaya transportasi selama ini menjadi mahal karena menggunakan transportasi darat. Mestinya, dari dulu harus bertumpu pada laut.

“Ini pergeseran yang perlu kita lakukan, tapi perlu waktu. Untuk itu kita butuh perguruan tinggi yang tidak hanya membangun keterampilan dan sisi teknis, tapi juga menciptakan pemimpin-pemimpin melalui program-program kepemimpinan kelas dunia, sehingga bisa menyiapkan profesional sekaligus kader maritim,” jelasnya.

Presiden memaparkan, beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kemaritiman telah dilakukan. Menurutnya,

urusan kemaritiman dan tol laut tidak hanya bicara masalah membangun pelabuhan, membeli dan membuat kapal, namun soal bagaimana sistem dibangun dan sumber daya manusia disiapkan.

“Saya kira langkah strategis seperti itu tidak hanya butuh infrastruktur keras, tapi juga perlu langkah strategis dan visioner, tapi berkaitan adanya infrastruktur lunak, untuk mengelola laut dan logistik kita,” tukasnya.

Presiden menegaskan, pembangunan pelabuhan merupakan hal yang sangat penting untuk sistem logistik nasional, perhubungan, dan juga global. Diperlukan manajemen di bidang kemaritiman dan pengetahuan yang mumpuni, sehingga Indonesia dapat menjadi pusat unggulan di bidang maritim.

Sementara itu, Direktur Utama Pelabuhan Indonesia II (Persero) R.J Lino berharap, IPC Corporate University dapat memberikan dampak positif dan signifikan pada kinerja operasional kepelabuhan di Indonesia.

“Di kemudian hari, IPC Corporate University tidak hanya dapat dimanfaatkan bagi karyawan IPC, tapi juga terbuka pemanfaatannya bagi Pelindo I, III, dan IV serta instansi atau masyarakat umum. Dengan fasilitas lengkap berstandar internasional, kampus ini mampu menyelenggarakan program pembelajaran secara paralel untuk 1.500 peserta,” jelas Lino.

Usai Presiden memberikan pidatonya, Presiden menandatangani Prasasti IPC Corporate University, dan dilanjutkan peninjauan fasilitas kampus.

Hadir pula dalam acara ini diantaranya Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Gusman, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djailil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. (sf,denus) foto: andri/parle/hr

Konsultasi DPR dan KPU Hasilkan Tiga Kesimpulan

Rapat Konsultasi Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi II DPR, Ketua Kelompok Fraksi Komisi II, dengan Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri menghasilkan tiga kesimpulan. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, usai rapat di Gedung Nusantara III, Senin (4/05/15).

Kesimpulan pertama, kata Fadli, DPR merekomendasikan hasil Panitia Kerja (Panja) Pilkada Komisi II DPR harus dimasukkan di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Kedua, DPR akan mencari jalan untuk melakukan revisi Undang-undang (UU) Parpol dan UU Pilkada. Kemudian, Pimpinan DPR juga akan melakukan konsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK),” jelas Fadli saat memberikan keterangan persnya, sambil didampingi Pimpinan Komisi II DPR.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Panja Pilkada Komisi II mengeluarkan tiga rekomendasi ke KPU. Pertama, kepengurusan partai politik bermasalah diselesaikan melalui lembaga peradilan (bersifat inkrah).



Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Kapoksi II Komisi II DPR rapat konsultasi dengan KPU dan jajaran Mendagri

Kedua, jika proses putusan berkekuatan hukum tetap membutuhkan waktu yang panjang, KPU mengusulkan agar dilakukan islah antar kepengurusan partai yang berkonflik, sebelum pendaftaran calon 26-28 Juli. Ketiga, jika inkrah dan islah tak terwujud, KPU dapat memutuskan kepengurusan yang berhak mengajukan pasangan calon adalah kepengurusan parpol yang telah mendapatkan putusan pengadilan terakhir.

“Seluruh fraksi dan Komisi II dengan tegas sepakat bahwa

poin ketiga (rekomendasi Panja Pilkada) harus dimasukkan dalam PKPU tentang Pencalonan. Tapi dari KPU merasa belum bisa memasukkan karena dianggap belum ada payung hukum atau UU yang jelas. KPU tetap bersikeras, itu sangat mengherankan,” tegas Fadli.

Padahal, tambah Politisi asal Dapil Jawa Barat V ini, pihaknya sudah menyampaikan bahwa rekomendasi DPR sifatnya mengikat sesuai UU No 17 tahun 2014 tentang MD3, untuk itu KPU wajib menjalankan rekomendasi tersebut. “Kami kaget tadi KPU bilang mereka bukan pejabat negara dan pejabat pemerintah, kan itu hal aneh,” imbuhnya.

Revisi UU itu, jelas Fadli, akan diusulkan sesuai mekanisme yang ada di DPR dan diserahkan kepada Komisi II DPR. Namun, jika KPU nantinya tetap tidak mau mema-

sukkan ketentuan ini, maka dipastikan akan menimbulkan implikasi dalam pilkada misalnya, akan timbul konflik politik dan sosial di daerah.

“Kalau kita mau *rigid* (kaku) kepada hukum, sesungguhnya ada hasil dari MK bahwa rezim pilkada bukan pemilu, maka penyelenggaranya bukan KPU. Tapi kita mau cari solusi masalah, sistem ketatanegaraan kita belum sempurna maka kita harus kompromi sambil penyempurnaan,” kata Fadli.

Sementara itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan itu, dan akan tetap melaksanakan pilkada sesuai dengan yang sudah ditetapkan di PKPU. (sf) foto: denus/parle/hr

Anggaran KY akan Dikonfirmasi ke Kemenkeu



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman rapat konsultasi dengan Pimpinan Komisi Yudisial

Anggaran Komisi Yudisial (KY) yang selama ini masih dibintangi akan segera dikonfirmasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Anggaran KY untuk 2015 relatif kecil hanya sekitar Rp119 miliar. Anggaran yang terblokir akan menyulitkan kinerja KY sendiri.

Demikian terungkap dalam pertemuan Ketua DPR RI Setya Novanto saat menerima delegasi KY di DPR, Kamis (30/4). “Anggaran yang dibintangi akan kita konfirmasi ke Kemenkeu supaya bisa dihapus bintangnya,” kata Novanto dalam pertemuan tersebut. Komisioner KY Imam Anshori Saleh

sempat mengeluhkan anggaran yang terblokir itu dan berharap tidak ada pemotongan pula.

Hadir mendampingi Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman. Ketua KY Eman Suparman dan seluruh komisioner KY hadir dalam pertemuan tersebut. KY juga menyoroti soal PP No.94/2012 tentang Gaji Hakim dan RUU Jabatan Hakim untuk kembali dicermati. KY menilai, para hakim adalah pejabat negara dan bukan PNS. Untuk itu perlu pengaturan khusus, baik menyangkut gaji maupun jabatannya.

RUU Jabatan Hakim sudah masuk Prolegnas dan minta agar DPR mempercepat pembahasannya. Sementara soal seleksi Hakim Agung, KY dan MA sudah membuat Peraturan Bersama (Perba) No.1/2012 untuk mengatur teknis pencalonan dan seleksi. Namun, belakangan ada *judicial review* atas Perba tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga proses seleksi hakim terhambat.

Ketua KY Eman Suparman menyampaikan, saat ini proses seleksi sudah memasuki tahap wawancara. Ada 36 calon hakim yang pada bulan Mei ini akan diseleksi lagi. Semua calon memiliki kapasitas intelektual dan pengetahuan yang memadai. “Mudah-mudahan KY bisa menyampaikan calon hakim terbaik ke DPR,” harap Ketua KY.

Pada bagian lain, Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman menyoroti soal kerja KY selama ini. Menurutnya, KY lebih sering mengikuti arus publik yang mengomentari produk putusan hakim. Padahal, yang harus dinilai KY adalah perilaku hakim. “Ada kesan KY bekerja di luar tugas pokoknya, yaitu dengan mengomentari putusan hakim. KY mestinya membantu dan menjaga kehormatan para hakim,” tandas politisi Partai Demokrat tersebut.

Betapapun putusan hakim, sambung Benny, bertentangan dengan kehendak publik, tapi sepanjang sesuai UU, KY harus membela putusan hakim. Ia mengharapkan KY konsisten dengan tugasnya. (mh) foto: denus/parle/hr



Fadli Zon Melepas Delegasi Sumbar Talenta ke Aljazair

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Fadli Zon mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Sumbar Talenta mengembangkan kegiatan seni dan budaya, dan mempromosikan kebudayaan Indonesia kepada negara lain.

“Saya yakin jika visi misi kebudayaan ini diperbanyak pasti akan membawa nama harum bagi bangsa Indonesia ke depan. Bangsa yang beradab itu adalah bangsa yang menghargai kebudayaannya,” katanya saat menerima dan melepas Delegasi Sumbar Talenta ke Aljazair, Kamis (30/4) di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta.

Dia mengatakan senang sekali akan ada delegasi ke Aljazair dan mudah-mudahan lancar, hingga pertunjukannya mendapatkan sambutan yang meriah dari publik, dan ini akan menjadi duta budaya Indonesia yang akan membawa nama baik Indonesia. “Misi budaya ini akan membawa suatu dampak yang besar, apalagi Aljazair merupakan salah satu negara sahabat Indonesia,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan untuk membawa suatu misi budaya dan kesenian ke luar negeri pasti akan bermanfaat, karena selain untuk memperkenalkan budaya Indonesia, juga menjadi salah satu tempat mengaktualisasikan diri, terutama bagi generasi muda.

Fadli sangat mendukung dan mudah-mudahan Sumbar Talenta ini bisa terus beraktivitas dan selanjutnya dapat tampil mengisi dalam acara-acara kenegaraan yang akan datang. “Saya senang dan bagus sekali jika bisa terus keberlanjutan,” katanya.

Ketua Himpunan Wanita Karya (HWK) Sumatera Barat, Sastri Yunizarti Bakry, menjelaskan Sumbar Talenta yang diselenggarakan kali ke-10 merupakan salah satu program tahunan HWK Sumbar. Bermula dari pemikiran menyelenggarakan kegiatan yang tujuannya penyaluran bakat, minat, dan kreatifitas remaja. Kaum remaja yang sibuk dengan kreatifitas positif pasti akan jauh dari aktivitas negatif.

HWK sebagai organisasi yang konsen terhadap pemberdayaan perempuan, remaja dan anak-anak menganggap kegiatan ini penting selain kegiatan yang selama ini dilaksanakan sosial. “Visi Sumbar Talenta adalah generasi muda bisa bertalenta seni yang tangguh, terampil, berpengetahuan, dan religius, sehingga melalui Sumbar Talenta ini bisa membina remaja berkarakter, berbudaya dan cerdas



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

pemikirannya,” paparnya.

Berangkat dari misi tersebut, kegiatan diawali dengan diskusi, melalui seleksi yang ketat dan mendalam banyak hal hingga karantina. Mereka dijejalkan dengan pengetahuan menulis kreatif, koreografi, iptek, vokal, penampilan panggung, dan teater.

Sejak 2014, setiap tahun Sumbar Talenta diselenggarakan dengan ratusan peserta. Setiap tahun pula pemenang talenta diundang ke luar negeri. Berulang kali tampil di Malaka, Selangor, Kuala Lumpur, Port Dickson, Negeri Sembilan, lalu berkembang ke Kamboja, Sydney, Brisbane (Australia), Madrid, Barcelona (Spanyol). Tahun ini Sumbar Talenta bersiap-siap menuju Alger, Constantine (Afrika), beberapa negara Eropa dan Singapura.

Sumbar Talenta menjadi duta seni dan budaya sumbar, dan telah menggaungkan budaya Sumbar di Ibukota Jakarta bahkan ke tingkat internasional, yakni Australia, Spanyol, Kamboja, Singapura, Malaysia dan banyak negara lainnya.

(as) foto: hamdis/parle/hr

DPR Dukung Uji Kompetensi, Hasilkan Jurnalis TV Berkualitas

Sumber berita yang paling banyak ditonton masyarakat adalah berita televisi, karena mereka tidak perlu buka gadget, tidak perlu baca koran, Cukup duduk di depan televisi, mereka sudah mendapatkan berita.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya usai mendampingi Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua Komisi VI Dedy Reza Alex Noerdin menerima Delegasi Ikatan Journalistik Televisi Indonesia

(IJTI) dipimpin Ketua Umumnya, Yadi Hendriana Selasa (28/4) di Gedung DPR.

Kedatangan Pengurus IJTI ke Gedung DPR, dimaksudkan untuk silaturahmi dan memperkenalkan IJTI kepada DPR. IJTI juga memberikan

masuk agar ada sertifikasi kepada jurnalis ke depannya.

Tantowi lebih lanjut mengatakan, karena informasi yang didapatkan melalui televisi menjadi bagian sehari-hari dari masyarakat, maka wajar jika ada peningkatan kualitas kemampuan para jurnalis.

“Karena itu, DPR sangat mendukung uji kompetensi ini dalam rangka menghasilkan penyelenggara jurnalis televisi yang berkualitas, *up to date*, sesuai dengan perkembangan jaman,” tegas dia.

Untuk itu pula, ke depan tidak ada lagi jurnalis televisi yang menyiarkan berita yang tidak sesuai kode etik. Selain itu, tidak ada lagi reporter-reporter yang ketika bertanya tidak mengerti dengan apa yang ditanyakan.

Di bagian lain, Pimpinan Komisi I dari FPG ini juga menyinggung perlunya perbaikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya, sebagai pengawas konten siaran.

Dari aspek kelembagaan, ia melihat bahwa sistem tidak hirarkis membuat keberlangsungan hidup KPI daerah itu



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Pimpinan Komisi I dan VI menerima Delegasi Ikatan Journalistik Televisi Indonesia (IJTI)

tidak sama. Ada KPID yang sejahtera, maju tetapi ada juga yang sebaliknya, sangat tergantung *political will* dari kepala daerah dan APBD nya.

Karena itu desain RUU Penyiaran secara kelembagaan hanya perpanjangan tangan dari pusat, sehingga pembiayaannya dari APBN. Diharapkan tidak akan ada lagi keluhan KPID komisio- nernya sudah 4 bukan tidak dibayar.

Dalam UU Penyiaran sebelumnya ada- lah mengenai lembaga-lembaga survei yang melakukan pemsurveian terhadap konten siaran yang disebut rating. Se-

lama ini mereka bebas bergerak tanpa ada institusi pemerintah yang menga- wasi. Dalam revisi UU Penyiaran salah satunya nanti akan diawasi oleh KPI mengenai sistem operasional penye- lenggaraan dari pemsurveian program- program TV tersebut sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. “Kita tahu betul siapa yang mensurvei, dia- dakan survei itu di daerah mana, kore- spondennya berapa, tidak gelap seperti sekarang,” jelas Tantowi. (dn,mp,rz) foto: [denus/parle/hr](#)

Protokol Punya Peran Penting



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti didampingi Karo. Humas dan Pemberitaan dan Karo Persidangan saat membuka Diklat Protokol

Protokol mempunyai peran penting dalam suksesnya acara yang berlangsung, baik didalam maupun di luar Kompleks Parlemen. Staf Protokol harus bersikap profesional, tanggap, dan terampil. Pasalnya, protokol merupakan ujung tombak dan garda paling depan dari sebuah instansi.

Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti, saat membuka diklat protokol bagi 17 staf protokol baru DPR, yang mulai digelar hari ini, Rabu (6/05/15), di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam kesempatan ini, Win, sapaan akrab Winantuningtyastiti didampingi Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko dan Kepala Biro Persidangan Helmizar.

“Peran protokol sangat penting dan perlu mendapat perhatian, sehingga perlu dikelola secara profesional. Harus

dipahami bahwa kegiatan keprotokolannya itu adalah ujung tombak. Protokoler harus berperan maksimal, sehingga tamu merasa dihormati,” pesan Win sebelum membuka diklat.

Win juga mengingatkan kepada para staf protokol yang baru ini untuk mempelajari UU MD3, tata tertib DPR, termasuk kode etik. Dan yang paling utama, staf protokol harus menguasai tugas kedewanan serta tugas, pokok dan fungsi dari DPR.

“Protokol dituntut untuk terampil, profesional, dan memahami agenda di DPR. Keterampilan dan wawasan harus sangat dipahami. Pengenalan medan juga tidak kalah penting. Acara dapat berjalan lancar, tamu juga merasa nyaman,” imbuhan Win.

Win juga menggarisbawahi bahwa protokol merupakan *frontliner* dari DPR. Sehingga tugas protokol bukan hanya menyambut, tapi juga mengawal tamu selama di DPR. Selama di DPR, tamu harus merasa dihormati.

“Semoga betah bertugas selama di DPR. Harus selalu senyum dan percaya diri, karena ada di garis depan dan mengawal pejabat. Harus bisa menguasai lingkungan dan memposisikan diri yang tepat, karena membawa nama lembaga negara,” pesan Win.

Acara diklat ini berlangsung dalam beberapa sesi. Diantaranya pengarahan dari praktisi protokol, dan pertemuan dengan Kepala Bagian dari seluruh Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan. (sf) foto: [andri/parle/hr](#)

Bangun Team Work Melalui Badminton

Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan Bapor Korpri menggelar kejuaraan bulu tangkis yang diikuti oleh anggota dewan, karyawan Setjen dan staf ahli. Kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi peserta untuk terus menerus menjaga kebugaran, meraih prestasi dan lebih jauh membangun kebersamaan dan semangat *team work*.

“Saya mendukung turnamen badminton seperti ini perlu dilakukan secara berkala, teratur, untuk membangun prestasi juga kebersamaan diantara karyawan, staf ahli dan dengan anggota dewan,” kata anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid saat membuka kegiatan secara resmi, Selasa (5/5/14).

Kegiatan yang mengusung tema, ‘Olah Raga Pengelola Semangat Juang, Membangun Jiwa dan Memupuk Kebersamaan’ ini sekaligus sebagai ajang peresmian Klub Badminton Parlemen Senayan. Diharapkan dengan kehadiran klub ini manajemen keanggotaan, latihan, pertandingan dapat lebih terkelola dengan baik.

Sementara itu Deputy Bidang Anggaran dan Pengawasan Setjen DPR RI Setyanta Nugraha berharap turnamen seperti ini dapat meningkatkan semangat kerja sama dan pada akhirnya membangun *team work*. “Kita bertemu di



Foto bersama peresmian Klub Badminton Parlemen Senayan

lapangan, berlatih dan bertanding bersama, hendaknya bermuara pada semangat *team work* di kesetiaan yang semakin solid,” tekannya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada anggota dewan yang meluangkan waktu untuk mengikuti turnamen badminton ini. Sejumlah anggota dewan telah terdaftar ikut berpartisipasi diantaranya Wahid Halim (FPD), Mustakim (FPPP) dan Abdul Hakim (FPPK).

Ketua Panitia Pelaksana Effendi menyebut kegiatan ini menjadi kesempatan bersilaturahmi menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Turnamen digelar dengan gabungan sistem gugur dan setengah kompetisi berlangsung di GOR Badminton DPR yang dibangun sesuai standar internasional. (iky) foto: rizka/parle/hr

Pengiriman Nakes Diharapkan Tidak Berbenturan

Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang akan mengirim tenaga kesehatan (nakes) ke berbagai daerah, diharapkan tidak berbenturan dengan program nakes Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang sudah ada di daerah.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati (dapil DKI II), Rabu (6/5), menanggapi pengiriman tahap pertama 143 nakes ke daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar (DTPK) dalam program Nusantara Sehat. Mereka akan ditempatkan di 120 Puskesmas di 48 kabupaten DTPK yang terdiri dari Aceh, Papua, Bengkulu, Maluku, NTT, Kalbar, dan Sulut.

“Yang perlu dicermati adalah *mapping* dari keperluan nakes pada suatu daerah, mengingat Kemenkes juga sudah memiliki program PTT di daerah-daerah. Jangan sampai pengiriman tim nakes ini seperti menggarami lautan, karena sudah tersedianya PTT di dae-

rah,” tandas Okky. Ditambahkannya, yang juga perlu dipikirkan adalah status para nakes usai kontrak tugas selama dua tahun di DTPK. Apalagi, masalah nakes PTT di daerah sampai kini belum jelas.

“Hendaknya hal ini menjadi pertimbangan Pemda pula untuk mengangkat mereka menjadi PNS,” harap Anggota F-PPP DPR itu. Namun, Okky tetap mengapresiasi program pengiriman nakes ini sebagai jawaban atas kekurangan dan ketidakmerataan penyebaran nakes di daerah. Dengan program ini, lanjut Okky, kejenuhan para nakes di daerah bisa teratasi. Selain itu, penanganan kesehatan di daerah diharapkan bisa diatasi secara holistik.

“Ketika Bu Nila dipilih oleh Pak Jokowi sebagai Menkes, saat itu saya berharap beliau akan membuat terobosan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Beliau



Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati

juga utusan MDG’s pada kabinet SBY. Tampaknya harapan saya terlaksana dengan program Nusantara Sehat ini yang merupakan pelaksanaan dari program Pencerah Nusantara ketika beliau menjadi utusan MDG’s,” ungkap Okky.

Seperti diketahui, 143 nakes yang dikirim itu terdiri dari 12 dokter, 20 perawat, 20 bidan, 20 tenaga kesehatan masyarakat, 20 tenaga kesehatan lingkungan, 16 ahli tenaga laboratorium medik, 20 tenaga gizi, dan 15 tenaga farmasi. Jumlah 143 nakes tersebut merupakan tahap pertama dari 960 nakes yang akan dikirim. (mh) foto: naefuroji/parle/hr

Legislator Sepakat Stop Kirim PRT ke Timur Tengah

Anggota Komisi IX DPR Hamid Noor Yasin menyatakan sepakat penghentian pengiriman TKI sektor pembantu rumah tangga (PRT) ke kawasan Timur Tengah. Meski demikian pemerintah harus memberi solusi dengan membuka seluas-luasnya lapangan kerja di dalam negeri.

Demikian ditegaskan Hamid saat dihubungi Parlemen Selasa (5/5) menanggapi Kemenaker yang akan melakukan penghentian TKI khususnya yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (PRT).

Kementerian Ketenagakerjaan akan mengeluarkan kebijakan penghentian penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor pembantu rumah tangga (moratorium) khususnya bagi pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah.

Pada pekan ini Menaker akan menandatangani SK (Surat Keputusan) tentang penghentian penempatan TKI ini. "Konsekuensinya, pengiriman TKI PRT (pembantu rumah tangga) nantinya termasuk *human trafficking* akan di setop," kata Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri di kantornya Senin (4/5).

Menurut Menaker, kebijakan penghentian ini dilakukan melalui *hard policy* dengan beberapa macam alasan. Salah satunya yaitu antara negara-negara di kawasan Timur Tengah masih menerapkan sistem *kafalah* atau *sponsorship*, di mana hak privasi majikan sangat kuat daripada perjanjian kerja maupun peraturan ketenagakerjaan. Akibatnya posisi TKI lemah, seperti tidak boleh pulang meski masa kontraknya habis dan dipindahtugaskan ke majikan lain.

Alasan lain gajinya rendah, antara Rp 2,7 juta-Rp 3 juta per bulan, sama dengan UMR disini. Ini tidak sebanding dengan resiko dan pengorbanannya meninggalkan keluarga di Indonesia.

Lebih lanjut Hanif menegaskan, dengan penghentian pengiriman TKI PRT tersebut maka pemerintah harus segera mencari solusi di dalam negeri untuk mengakomodir kepentingan mereka. Di sisi lain, Komisi IX akan memperjuangkan agar RUU Perlindungan PRT bisa masuk Prolegnas dan segera disahkan. Pasalnya RUU yang diperjuangkan selama 11 tahun itu belum dibahas DPR.



Anggota Komisi IX DPR Hamid Noor Yasin

Dengan adanya UU PRT, kata Hamid, diharapkan perlakuan kepada pembantu rumah tangga itu lebih manusiawi. Selama ini perlingkungannya tidak ada, gajinya juga tidak jelas dan jam kerjanya juga tidak diatur dengan jelas.

Politisi PKS ini menegaskan, pengiriman TKI ke luar negeri harus ditekankan kepada tenaga trampil atau memiliki keahlian (*skill*). Dengan demikian pengiriman 'pahlawan devisa' akan membawa manfaat bagi tenaga kerja itu sendiri dan negara. Dengan tenaga terampil maka jaminan dan perlingkungannya jelas serta meminimalisir bahkan meniadakan dampak negatif yang akan terjadi. (mp) foto: naefuroji/parle/hr



Anggota Komisi IX DPR Imam Suroso

Menyusul rencana revisi terhadap Perpres No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, perlu terobosan kebijakan baru agar rumah sakit (RS) swasta bisa lebih banyak yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 36 ayat (3) Perpres tersebut di atas hanya menyebut kata "dapat" bagi RS swasta untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sementara RS pemerintah seperti disebutkan

Perlu Terobosan Kebijakan Untuk RS Swasta

dalam pasal 36 ayat (2) menggunakan kata "wajib" untuk berkerja sama dengan BPJS Kesehatan. Presiden Joko Widodo sendiri beberapa waktu lalu di Medan menyerukan, agar RS swasta yang tidak mau berkerja sama dengan BPJS Kesehatan diberi sanksi.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso (dapil Jateng III) mengatakan, dibutuhkan terobosan yang bijak untuk mewajibkan semua RS swasta di Indonesia agar bisa berkerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Silakan merevisi Perpres No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan. Itu bagus dan memang diharuskan. Tapi, soal kerja sama RS swasta dengan BPJS Kesehatan butuh terobosan kebijakan agar RS swasta tidak terus merugi,"

kata Imam, saat dihubungi Senin (4/5).

RS swasta, sambung Imam, selama ini membiaya sendiri operasionalnya. Jadi, bila ingin membangun kerja sama yang saling menguntungkan perlu dipikirkan subsidi biaya operasional RS swasta. Anggota F-PDI Perjuangan DPR ini menyebutkan, RS swasta yang sudah berkerja sama dengan BPJS Kesehatan hanya menerima sedikit kalim anggaran untuk operasi bedah. Sementara untuk pengoperasian rawat ICCU tidak mendapat subsidi.

"Dengan begini, RS swasta agak berat untuk membangun kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Otomatis layanan kesehatan bagi masyarakat kurang maksimum. Bahkan, banyak yang menolak pasien peserta BPJS Kesehatan," ungkap Imam. (mh) foto: rizka/parle/hr



OJK Upayakan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat NTT



Suasana pertemuan Tim Kunker Komisi XI DPR dengan OJK Provinsi NTT

Di usia yang relatif muda dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentunya OJK menghadapi tantangan internal dan eksternal. Untuk itu, OJK diberi mandat untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan secara menyeluruh termasuk didalamnya perlindungan kepada nasabah.

Demikian disampaikan Ketua Tim Komisi XI DPR I.G.A Rai Wirajaya dalam pertemuan dengan jajaran OJK dan Bank Indonesia Kupang dalam serangkaian kunjungan kerja Komisi XI

DPR ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (28/4).

Komisi XI berharap, tantangan-tantangan tersebut dilaporkan kepada Komisi XI. Dalam kesempatan tersebut, Komisi XI DPR juga mempertanyakan bagaimana bentuk perlindungan konsumen dan masyarakat yang sudah dilakukan oleh OJK NTT.

Perwakilan dari OJK Provinsi NTT, Sukanto menjelaskan bahwa bentuk perlindungan konsumen dan masyarakat yang sudah dilakukan oleh OJK dilakukan secara preventif (pencegahan) dan refresif (penyelesaian perma-

salahan).

“OJK terus menyuarkan dan mengupayakan perlindungan konsumen yang telah dibangun oleh Kantor Pusat OJK,” kata Sukanto. Antara lain, sambungnya, melalui *hotline financial customer area*, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa, dan kewajiban pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen oleh lembaga keuangan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Menurutnya, kendala yang dihadapi dalam rangka perlindungan konsumen dari OJK adalah kendala luasnya jangkauan kondisi geografis wilayah NTT yang terdiri dari beberapa pulau. Selain itu, jelasnya, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui peran dan fungsi OJK dalam rangka perlindungan konsumen dan belum memadainya tindak lanjut pengaduan terhadap lembaga jasa keuangan yang tidak berkantor di wilayah NTT.

Sedangkan dari sisi konsumen, kata Sukanto, masih belum memadainya pengetahuan konsumen atas hak dan kewajibannya terhadap produk jasa keuangan yang diterima. “Yang jelas konsumen belum mengetahui prasyarat yang harus dipenuhi dalam rangka perlindungan konsumen,” kata Sukanto mengakhiri penjelasannya.

(iw) foto: iwan armanias/parle/hr

Impor Baja Harus Dikendalikan

Merajalelanya impor baja telah menggerus industri baja nasional. Tarif bea masuk impor baja pun terlalu rendah dan tidak proporsional. Kepentingan industri baja lokal harus dilindungi. Yang perlu diwaspadai lagi adalah impor baja dari Cina yang sangat murah, sehingga menghancurkan harga baja lokal.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan (dapil Jabar IV) menegaskan

hal tersebut saat dihubungi Rabu (6/5). Pemerintah dihimbau mampu mengendalikan impor baja dengan mengatur kembali tarif bea masuk yang kini hanya 5 persen.

“Tarif bea masuk yang proporsional akan mampu mengamankan kepentingan pelaku industri baja nasional yang selalu mengeluhkan banjirnya baja impor, khususnya dari Cina. Di pasar domestik, harga baja impor Cina



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

lebih murah 3-5 persen daripada harga lokal,” papar Heri.

Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah saat

ini, suplai kebutuhan baja nasional untuk infrastruktur harus dipastikan memanfaatkan produksi baja lokal dengan kualitas yang terjamin dan aman. Menurut politisi Partai Gerindra itu, baja adalah industri strategis, tidak hanya berdimensi ekonomis tapi juga pertahanan. “Oleh karena itu, kebijakan menaikkan tarif bea masuk impor baja harus dipandang sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional,” jelas Heri.

Lebih lanjut Heri mengatakan, data tahun 2012, konsumsi per kapita baja nasional sebesar 51 kg. Namun, seiring peningkatan GDP (*Gross Domestic Product*), konsumsi baja per kapita nasional ditaksir mencapai 100 kg pada tahun 2020. Ada tiga hal penting, sambung Heri, yang bisa dilakukan

pemerintah untuk mengamankan harga jual baja lokal. Pertama, pembatasan impor baja dari Cina. Kedua, penggunaan bahan baku lokal seperti besi bekas (*scrap*), bijih besi (*iron ore*), dan baja setengah jadi (*slab*). Ketiga, jaminan pasokan energi untuk industri baja lokal.

“Pemerintah perlu melakukan terobosan kebijakan yang mampu mengamankan harga jual baja lokal dengan melakukan pengendalian impor baja, terutama dari Cina. Dan sebagian besar bahan baku industri baja saat ini masih impor. Kondisi itu membuat industri baja nasional sangat bergantung pada fluktuasi harga bahan baku dunia,” jelas Heri.

Belajar dari pengalaman yang ada, Heri mengingatkan, ketika bahan baku

baja naik signifikan tahun lalu, industri baja lokal terpaksa menaikkan harga produk baja sekitar 13-15 persen dari harga lama. Pada akhirnya, pelaku usaha baja lokal sulit menentukan harga yang kompetitif.

“Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong peningkatan bahan baku lokal. Dengan kata lain, sumber daya mineral seperti bijih besi, bijih aluminium, *steel scrap*, dan lain-lain, wajib digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan industri baja nasional. Saatnya menghentikan eksploitasi dan ekspor sumber daya mineral Indonesia ke luar negeri yang tidak mampu memberikan nilai tambah,” tegas Heri lagi.

(mh) foto: naefuroji/parle/hr

Kondisi Sarana Prasarana Penegak Hukum Malut Minim

Komisi III DPR RI menemukan ada beberapa kabupaten yang tidak mempunyai kejaksaan dan pengadilan. disisi lain, Fasilitas dan prasarana institusi kepolisian di daerah Maluku Utara masih minim.

“Tentunya ke depan, Kita sepakat untuk saling memperbaiki dengan kekurangan-kekurangan sarana dan prasarana,” kata Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa, kepada wartawan, Senin, (4/5), usai Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenhukham, Kapolda, Kajati, Kepala BNN, Ketua Pengadilan Tinggi, Agama, Militer, Provinsi Maluku Utara.

Menyinggung sarana dan prasarana kepolisian, lanjut Desmon, jumlah personil kepolisian tidak sebanding dengan luas wilayah yang ada di Maluku Utara “Dengan luas wilayah yang ada. Dengan jumlah personil kepolisian. Kapolda Maluku Utara juga telah meminta Komisi III memperjuangkan

penambahan personil sesuai target yang telah ditentukan Mabes Polri,” jelasnya.

Menurutnya, persoalan ini akan dibawa ke Komisi III DPR. “Persoalan penegakan hukum dengan keterbatasan Komisi III juga soroti, diantaranya persoalan Tipikor yang ada di daerah ini. Persoalan narkoba juga dibicarakan,” jelasnya.

Dia menambahkan, persoalan sarana prasarana tentu akan menjadi prioritas saat membicarakan anggaran nantinya. “Saat membahas anggaran kita akan membicarakan tentang Maluku Utara ini,” ujarnya.

Sarana dan prasana yang dianggap kurang di sektor penegak hukum seperti peradilan, kejaksaan, lanjutnya, akan diprioritaskan ketika pembahasannya nantinya. “Persoalan dari Morotai untuk sidang ke Tobelo, perlu waktu dan perlu biaya harus diantisipasi agar pencari keadilan itu ada kepastian. Termasuk aparatupun



Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa

harus disiapkan anggarannya agar dapat menjalankan tugas menegakkan hukum di masyarakat,” jelasnya.

Pada kunjungan ke Maluku Utara, Komisi III DPR dipimpin langsung oleh Desmen J. Mahesa, didampingi oleh rombongan Komisi III DPR yaitu Masinton Pasaribu, John Kenedy Azis, Wendy Haryanto, Syaiful Bahri Ruray, Wihadi Wiyanto, I Putu Sudiartana, Muslim Ayub, Tb. Soemandjaja, Asrul Sani, dan Taufiqul Hadi. (as)

Komisi II DPR Tinjau P4S Pekanbaru Riau

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengatakan, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swasembada (P4S) terpadu terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat kecil khususnya dalam meningkatkan potensi masyarakat di sek-

tor pertanian.

“Memang kita akui P4S dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara langsung, jadi apa yang diprogramkan oleh pemerintah yang diprakarsai Bupati Kampar itu betul-betul terwujud dan nyata hasilnya,” terangnya saat melakukan Kunker Komisi II DPR ke Pekanbaru baru-baru ini.

Menurutnya, melalui cara ini dapat menciptakan suatu sistem yang saling keterkaitan antara pertanian, perikanan dan peternakan sekaligus yang ada didalam lokasi tersebut. “Intinya yaitu kita ingin dapat menggerakkan partisipasi



Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman sedang mempraktekkan alat penggilingan pakan ternak

masyarakat dan sekaligus melatih dan memberikan contoh yang jelas dan kongkrit jadi bukan hanya pidato-pidato semata, kita ingin memberikan percontohan yang kongkrit,” jelas Rambe.

Dia mengharapkan lokasi P4S yang disiapkan oleh Bupati Kampar dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. “Kita harapkan Menteri Pertanian dapat berkenan datang kemari, kita di DPR juga sudah datang untuk melihat secara langsung upaya-upaya yang telah dilakukan Pemda ditengah masyarakat, dan Komisi II DPR menyatakan dengan tegas siap mendukung program tersebut,” tegas Rambe.

Komisi V DPR RI Tinjau Infrastruktur di Jawa Tengah

Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Reses Masa Persidangan ini melakukan kunjungan kerja ke tiga provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Provinsi Jawa Tengah.

Tim Kunjungan Kerja Komisi V ke Provinsi Jawa Tengah dipimpin Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana Adia meninjau berbagai infrastruktur dan proyek strategis di provinsi jantungnya Pulau Jawa tersebut.

“Kita melakukan pengawasan dan menyerap aspirasi terhadap beberapa proyek strategis di Jawa Tengah yang berkaitan dengan Sumber Daya Air, penanganan banjir, pemukiman kumuh dan kebinamargaan,” terang Yudi kepada Parlemen saat mengunjungi *fly over* Palur di Solo, Rabu (29/04/2015).

Menurut politisi PKS ini, ada beberapa proyek yang ditinjau diantaranya pembangunan Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Sumarmo Solo, Jalan Tol Ruas Semarang-Solo, Ruas Jalan Nasional Bawen-Solo, pembangunan sistem drainase primer Kota Semarang dan kemacetan-kemacetan yang diakibatkan perlintasan kereta api seperti pada pembangunan *fly over* Palur dan *underpass* Makamhaji di Kartosuro, Sukoharjo.

“Kami mendapatkan penemuan selama kunjungan ini, dimana antara Bina Marga dan Ditjen Kereta Api diperlukan

Rambe Kamarul Zaman mengatakan bahwa sejatinya kunjungannya ke Propinsi Riau ini dalam rangka untuk melihat secara langsung tempat Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swasembada (P4S) yang berlokasi di Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Ampar, Pekanbaru Riau.

Sementara Bupati Kampar Jefry Noer mengharapkan, seluruh peserta P4S ketika menjadi alumni dapat menjadi ujung tombak untuk mengubah kehidupan keluarga dan masyarakat lainnya.

“Orang-orang yang ikut dalam pelatihan ini adalah orang-orang pilihan dan tidak semua masyarakat yang perekonomiannya mendapat kesempatan sama. Jadi setelah pelatihan ini, maka harus sudah menjadi orang yang berhasil dan menularkan keberhasilannya tersebut kepada masyarakat kurang mampu lainnya,” jelasnya.

Dia mengatakan, alumni P4S harus mampu memahami konsep kerja yang baik profesional dan selalu memiliki target yang harus dicapai, karena bekerja harus memiliki motif dan tujuan yang jelas.

“Ada beberapa hal yang mendukung agar pekerjaan yang dijalani terasa mudah dan berujung pada kesuksesan, disamping itu juga harus optimis bahwa dalam bekerja termasuk dalam menjalankan program yakni rumah tangga mandiri pangan dan energy, program tersebut kedepan akan berhasil dan mampu memberantas kemiskinan dan pengangguran,” katanya. (Spy) foto: supri/parle/hr



Tim Kunker Komisi V DPR saat meninjau pembangunan Bandara Ahmad Yani Semarang

adanya koordinasi untuk mempercepat berbagai kegiatan khususnya di daerah perlintasan kereta api,” papar Yudi.

“Di Sukoharjo ada masalah dengan masyarakat, di sini (Palur) juga ada masalah antara Bina Marga dengan Ditjen Kereta Api yang harus ada beban sewa tahunan yang tidak sedikit. Ini harus segera diselesaikan oleh pihak pemerintah dan semuanya masih di bawah Komisi V DPR,” tambahnya.

Politisi dari daerah pemilihan Jawa Barat ini berharap, pemerintah melakukan langkah yang cepat dalam pembangunan infrastruktur yang transparan. “Jangan sampai penyerapan anggarannya kecil,” imbuhnya.

Ia juga menjelaskan, pengawasan yang dilakukan Komisi V DPR RI tidak semata-mata yang berasal dari APBN, tetapi juga terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan. “Tentunya yang kita harapkan dapat memperlancar dan mempermudah proses kegiatan yang ada,” mantap Yudi. (sc) foto: suciati/parle/hr

Komisi VIII Serahkan Bantuan untuk Provinsi Sulbar

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Barat, Senin (27/4) disambut oleh Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh dan langsung menggelar pertemuan dengan pegawai dan pejabat lingkup provinsi Sulbar di aula kantor Gubernur Sulbar.

Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI Deding Ishak (F-Golkar) yang juga wakil ketua komisi VIII mengatakan dalam kunjungannya ke Sulawesi Barat untuk menyerap aspirasi yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat dan berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pemerintah di daerah ini.

“Kita akan bantu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah ini, soal kesejahteraan sosial, soal agama, soal bencana dan lain sebagainya. Silahkan usulkan insya Allah kami akan perjuangkan di pusat,” ungkap politisi Golkar itu.

Pada kesempatan ini Komisi VIII menyampaikan sejumlah bantuan, di antaranya, satu set perahu lipat untuk BNPB Pemrov Sulbar, Rp328 juta untuk 274 orang cacat, menyerahkan dana pemenuhan kebutuhan anak dan pendampingan sejumlah Rp969 juta. “Bukan cuma ini, kedepan akan kami bantu anggaran yang jauh lebih besar,” katanya.

Sementara, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh dalam sambutannya mengatakan kedatangan komisi VIII ke Sulbar selain untuk menyerap aspirasi rakyat di daerah ini, juga dalam rangka melihat kondisi anak di Polewali Mandar yang



Tim Kunker Komisi VIII DPR saat pertemuan dengan Pemprov. Sulbar

kondisinya sangat memperhatikan, yakni Muhammad Ali, anak berusia 6 tahun yang menjadi tulang punggung keluarganya.

Anwar berharap kedatangan Komisi VIII DPR RI ke Sulbar dapat membawa angin segar bagi daerah ini, khususnya di bidang keagamaan dan penanggulangan bencana.

“Banyak hal yang masih kita butuhkan di daerah ini, kami berharap komisi VIII dapat memperjuangkan aspirasi daerah ini,” ujar Anwar. (Ray) foto: izka/parle/hr

FTZ Kurang Berfungsi Maksimal



Anggota Komisi VI DPR Eriko Sotarduga berjabat tangan dengan Gubernur Kepri

Anggota Komisi VI DPR Nyat Kadir menyatakan, pengembangan Provinsi Kepulauan Riau agak terhambat dikarenakan kurang maksimalnya status *Free Trade Zone* (FTZ) atau Kawasan Perdagangan Bebas yang disandanginya. Ia menilai, satu-satunya FTZ yang dianggap berjalan cukup baik adalah Kota Batam. Sisanya, seperti Kabupaten Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun, dinilai perlu sebuah kebijakan yang lebih berpihak.

Demikian dikatakan Nyat saat melakukan peninjauan langsung Kabupaten Karimun, Kepri, dalam rangka kunju-

ngan kerja Komisi VI DPR, pada penghujung April lalu. Dalam kesempatan yang sama, separuh dari Tim Kunker Komisi VI ke Kepri, meninjau Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.

“Karena itu, Komisi VI DPR sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mempercepat pemanfaatan status FTZ yang ada di Kepri. Salah satu persoalan FTZ, adalah kebijakan pemerintah pusat masih setengah hati untuk melimpahkan kewenangan kepada lembaga yang menanganinya, yakni Badan Pengusahaan (BP Batam),” ujar Legislator yang pernah menjabat Walikota Batam ini.

Politisi F-Nasdem ini menyatakan, FTZ Karimun memiliki potensi yang sangat strategis karena bisa menangkap peluang investasi mengingat Karimun berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.

“Kami ingin FTZ Karimun berkembang pesat seperti Batam. Tentunya harus didukung penganggaran dan sarana infrastruktur pendukung. Kami juga akan mengkaji kemungkinan perluasan FTZ Karimun,” jelas Politisi asal Dapil Kepri ini.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VI Eriko Sotarduga berjanji akan mencoba untuk memberikan satu perubahan agar kawasan ekonomi khusus, seperti Karimun bisa berkembang dan meningkatkan kehidupan dari masyarakat yang ada di daerah.

“Untuk itu kita tentunya mengharapkan banyak investor, bukan hanya investor luar negeri, tapi investor dalam ne-



geri juga yang masuk ke daerah ini,” harap Eriko.

Tentunya, tambah Politisi F-PDI Perjuangan ini, hal perlu didukung oleh kondisi infrastruktur dan kesiapan dari pemerintah Kabupaten atau Kota, maupun Pemerintah Provinsi, dan masyarakat untuk menyambut investor yang akan datang ke Kepri.

Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengapresiasi kun-

jungan Komisi VI ke FTZ Karimun. Ia berharap kunjungan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara.”

“FTZ Karimun sudah cukup berkembang, kami berharap pemerintah terus mendukung pengembangannya,” harapnya. (sf) foto sofyan/parle/hr

Sulut Butuh Pasokan Listrik dan BBM

Komisi VII DPR menilai perlu penambahan penyediaan listrik serta pasokan BBM termasuk energi baru dan terbarukan mengingat daerah ini merupakan provinsi Perbatasan.

“Kami akan membantu setiap permasalahan yang ada, karena itu mitra kerja yang ikut bersama dapat mencatat masukan untuk ditindaklanjuti,” ujar Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika kepada Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil, baru-baru ini.

Dia mengatakan saat ini tantangan kedepan terkait energi dan sumber daya mineral (ESDM) yakni keterbatasan energi untuk pemenuhan kebutuhan gas, bahan bakar minyak dan kelistrikan.

“Tak hanya di wilayah Sulut, permasalahan itu pun terjadi di beberapa daerah di Indonesia,” kata Kardaya.

Dia mengatakan kunjungan komisi VII DPR-RI untuk melakukan fungsi pengawasan serta menyerap aspirasi yang ada di daerah serta turun kelapangan untuk memantau perkembangan di lapangan, khususnya di Sulut.

Kunjungan ini, katanya, sesuai dengan ruang lingkup kami dalam menangani masalah energi sumber daya mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. “Untuk itu kami akan prioritas membahas kelistrikan di Sulut, pengolahan Migas dan juga pengelolaan Lingkungan Hidup,” kata Kardaya.

Terkait energi listrik, Supratman Andi Agtas (Fraksi Gerindra) mengatakan Kendala kelistrikan menyangkut pembebasan lahan. “PLN selalu mengeluhkan soal lahan, karena itu saya berharap Pemerintah daerah Sulut dan Kabupaten



Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika

memberikan support untuk pembangunan lahan pembangkit,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Wagub Sulut Kansil mengungkapkan bahwa Pulau Miangas dan Sitaro hingga kini belum ada SPBU, yang ada hanya di Sangihe, demikian hal dengan Kabupaten Bolsel dan Bolmut yang ada hanya di Boltim tapi hanya Premium solar belum ada. “Permasalahan BBM ini juga ikut dirasakan oleh para nelayan kita, karena belum ada SPBU,” jelas Wagub yang didampingi Sekdaprov Sulut, Ir. SR. Mokodongan. (Si) foto: sugeng/parle/hr

Dewan Nilai Underpass Makamhaji Sukoharjo Tidak Bermutu

Dewan menilai *underpass* Makamhaji di Jalan Slamet Riyadi Kartosuro, Sukoharjo tidak bermutu. Pembangunan *underpass* ini dinilai sudah bermasalah sejak perencanaan dan selalu digenangi banjir apabila turun hujan. Bahkan oleh masyarakat sekitar, *underpass* tersebut ditanami pohon pisang sebagai bentuk protes.

Anggota Komisi V DPR RI Mohammad Toha mengatakan, berdasarkan pengamatannya bangunan senilai Rp 27 miliar itu tidak bermutu. Karena memang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan selama dioperasikan sejak 2013 lalu selalu kebanjiran. Bahkan, *underpass* dinilai sudah ada masalah sejak perencanaan dan terkesan menyalahi standar besaran teknis (*bestek*).

Oleh karena itu, menurutnya, Komisi V akan memanggil Dirjen Perkeretaapian atau satker yang bertanggungjawab dan kontraktor yang bersangkutan (PT Dian Previta).

“Dirjen perkeretaapian dan kontraktornya harus bertanggung-

jawab. Mereka akan kami panggil pada awal Mei nanti. Menurut bapak-bapak ini (anggota Komisi V) memang tidak mutu. Karena tidak berfungsi, berarti buruk (*underpass*),” tutur M. Toha saat Tim Kunjungan Kerja Komisi V dipimpin Yudi Widiana Adia meninjau *Underpass* Makamhaji di Jalan Slamet Riyadi, Kartasura, Sukoharjo, Rabu (29/4/2015).

Peninjauan ini merupakan agenda tambahan Komisi V DPR dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Tengah.

Toha menyatakan, bukan tidak mungkin *Underpass* Makamhaji akan dibangun ulang. Namun demikian, masih perlu menunggu kajian informasi-informasi dari Dirjen dan kontraktornya.

“Nanti kita lihat kajiannya dulu. Apakah mau dibongkar atau hanya direnovasi. Intinya supaya *underpass* berfungsi sebagaimana mestinya,” terangnya.

Senada dengan Toha, Ketua Tim Komisi V DPR Yudi Widiana Adia menyatakan polemik di *Underpass* Makam-



Anggota Komisi V DPR M. Toha dan Yoseph Umarhadi meninjau underpass Makamahaji di Kartosuro, Sukoharjo yang digenangi air

haji akan menjadi motivasi dalam menyikapi kebijakan-kebijakan eksekutif.

“Komisi V akan mengkaji pola-pola permasalahan dan mempelajari aturan yang melingkupinya. Sebab, terdapat puluhan ribu perlintasan sebidang dan salah satunya di *Underpass* Makamahaji,” terang Yudi.

“Saya berharap Dirjen Perkeretaapian menyelesaikan masalah *Underpass* Makamahaji sebaik-baiknya. Karena anggaran yang dikucurkan tidak sedikit. Nanti kami akan minta ahlinya untuk menilai proses DED *underpass*. Kami akan minta bantuan Dirjen Bina Kontruksi dan Dirjen Bina-marga,” tambah Yudi.

Sementara itu, Kasi Prasarana Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah, Yus Rizal mengatakan pihaknya sudah mengambil tindakan sejak Selasa (28/4). Pihaknya akan menurunkan tim ahli untuk mengatasi aliran sungai tanah disana.

“Solusi tercepat, setelah kering kita melakukan survei terhadap keberadaan aliran air bawah tanah. Selain itu, kolam penampungan diperbesar dan kapasitas pompa kita tambah,” katanya.

Yus Rizal belum bisa memastikan kapan *underpass* dibuka

UPT Pemasarakatan di Sultra Masih Minim

Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap melakukan pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mendapatkan masukan tentang permasalahan hukum di Sultra, Rabu (29/04).

“Anggota Komisi III DPR ingin mengetahui kondisi Lapas dan Rutan dan penanganan masalah nara pidana narkoba serta keimigrasian di Sultra,” kata Mulfachri.

Di daerah lain di Indonesia, ungkap

Mulfachri, Lapas (Lembaga Pemasarakatan) dan Rutan (Rumah Tahanan) menjadi tempat transaksi narkoba karena diduga melibatkan petugas di instansi tersebut.

Politisi PAN ini juga menyampaikan bahwa permasalahan kekurangan UPT (Unit Pelayanan Teknis) Pemasarakatan di daerah yang berbentuk pulau-pulau masih menjadi kendala, dalam hal ini Komisi III ingin mengetahui apakah UPT Pemasarakatan di Sultra juga mengalami kekurangan.

Lebih lanjut Anggota Komisi III Didik Mukrianto mempertanyakan, dirinya

kembali. Yang jelas pihaknya akan mengkaji hasil survey tim ahli tanah yang menguasai aliran air tersebut. “Selama bisa dikeringkan dan jalan sudah dirapikan kita buka,” katanya.

Sementara itu, di lokasi *underpass* Makamahaji tampak dua alat berat yang mengeruk atau menggali badan jalan *Underpass* Makamahaji.

Pengerukan itu dititikberatkan pada aspal-aspal yang muncul mata air. Ada sejumlah titik yang digali dan mengalir baik di sisi barat ataupun timur genangan utama. Mata air di galian terpantau cukup deras dan cepat menggenangi galian. Bahkan disalah satu galian, pompa air kecil tidak mampu mengurasnya.

Selain itu, tampak sejumlah pekerja memasang pompa untuk menguras genangan utama yang tampak semakin surut. Informasinya, pompa-pompa berkapasitas besar itu didatangkan langsung oleh Kementerian Perhubungan.

Sebelum melakukan peninjauan ke *Underpass* Makamahaji, dalam waktu yang sama Tim Komisi V DPR melakukan peninjauan ke Kapal Basarnas dan Dermaga Sandar Kapal SAR dan proyek jalan tol Ruas Semarang-Solo.

Sehari sebelumnya Tim Komisi V DPR RI melakukan kunjungan ke proyek pembangunan Bandara Ahmad Yani Semarang dan melakukan pertemuan dengan PT. Angkasa Pura I, peninjauan sistem drainase primer Kota Semarang, peninjauan ke sekolah Politeknik Ilmu Pelayaran di Semarang dan melakukan pertemuan dengan Kepala Kanwil PT. BTN Jawa Tengah terkait masalah penyaluran dana FLPP di Jawa Tengah.

Selain Yudi dan M. Toha, Tim Komisi V DPR yang turut serta dalam kunjungan ini, antara lain Muhidin M. Said (Wakil Ketua Komisi V/FPG), Sudjadi (F-PDIP), Damayanti Wisnu Putranti (F-PDIP), Budi Yuwono (F-PDIP), Yoseph Umarhadi (F-PDIP), Elion Numberi (FPG), Roem Kono (FPG), Novita Wijayanti (F-Gerindra), Saiful Rasyid (F-Gerindra), Willem Wandik (F-PD), Hanna Gayatri (F-PAN), A. Bakri HM (F-PAN), Syahrulan Pua Sawa (F-PAN), Alamuddin Dimiyati Rois (F-PKB), Fatmawati Rusdi (F-PPP) dan Soehartono (F-Nasdem). (sc) foto: suciati/parle/hr

ingin tahu, apakah di Sultra, juga ada bisnis narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas atau Rutan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sultra, Ilham Jaya menjelaskan bahwa Sultra yang memiliki 15 kabupaten dan dua daerah kota, hanya terdapat lima Lapas dan Rutan.

Kelima Lapas/Rutan itu tersebar di Kota Kendari terdapat satu Lapas dan satu Rutan, Kota Baubau satu Rutan, Kabupaten Kolaka satu Rutan dan Kabupaten Muna satu Rutan.

Sedangkan di kabupaten lainnya, kata dia, hingga saat ini belum memiliki Lapas/Rutan, sehingga kalau tahanan terpidana atau tahanan negara ditampung di Lapas/Rutan terdekat dengan daerah itu.



Tim Kunker Komisi III DPR sidak Lapas kelas II Kendari, Sultra

“Di Kabupaten Wakatobi yang jarak tempuhnya ke Kota Baubau dengan menggunakan jalur transportasi laut mencapai sekitar sembilan jam, para terpidana di daerah tersebut harus menjalani proses hukum atau masa hukuman di Rutan Kota Baubau,” kata-

nya.

Meskipun demikian, jumlah nara pidana (napi) yang ditampung setiap Lapas atau Rutan tersebut masih dalam batas wajar karena belum melebihi daya tampung hingga 100 persen.

“Kendala yang dialami petugas juga adalah masih membaurnya antara napi narkoba dan napi tindak pidana lain karena di daerah ini belum ada Lapas khusus untuk menampung napi narkoba,” katanya.

Ia juga menjelaskan, sampai saat ini baru ada satu kasus yang melibatkan petugas Lapas, namun barang bukti narkoba tidak ditemukan di dalam Lapas melainkan di luar Lapas.

Ilham Jaya juga menjelaskan, khusus keimigrasian di Sultra tidak terlalu masalah, karena daerah ini bukan merupakan pintu masuk warga negara asing, melainkan hanya menerima setelah warga asing melalui proses pendataan di pintu-pintu masuk seperti Jakarta, Bali atau Batam.

Musfachri berjanji akan menyerap masukan dari pihak Kanwil Kemenkumham Sultra itu untuk ditindaklanjuti pada rapat konsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, terutama pendirian UPT Pemasyarakatan di Sulawesi Tenggara yang masih minim. (skr)

Kondisi Rutan Malut Tidak Beradab



Tim Kunker Komisi III DPR saat meninjau Rutan Malut

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J. Mahesa mengatakan, kondisi Rutan di Maluku Utara sangat memprihatinkan dan tidak layak. “Misalnya saja fasilitas toilet sangat buruk sanitasinya, misalnya mereka buang air kecil

lewat selang dan kaya mengisi bensin aja, buang ke selokan dan sangat bau. Tadi kami (Komisi III) kunjungi juga lapas penggantinya, itu tinggal dipoles-poles sedikit pagar dan macam-macam. Kita akan bicarakan dengan

Menteri Hukum dan HAM, bagaimana fasilitas ini bisa maksimal,” ungkapnya kepada Parlemen baru-baru ini.

Menurutnya, kondisi ini sudah tidak beradab dan sangat memprihatinkan. “Bayangkan tidak punya toilet, tidak ada kamar mandi, kalau mau buang air kecil di depan pintu, pakai corong plastik, ngucur ke depan selokan. Itu bagaimana kalau musim kemarau, sangat bau, air tidak ada,” jelasnya.

Dia menambahkan, Komisi III DPR mendorong agar disiapkan gedung baru yang memiliki fasilitas dan sarana memadai, tidak seperti ini. “Kita dorong untuk cepat pindah, karena gedungnya sudah ada. Kita harapkan nanti Menteri Hukum dan HAM meresmikan ini secepatnya,” ungkapnya.

Terkait fasilitas kantor kejaksaan yang terlantar, dia mengatakan baru satu yang sudah efektif yaitu peradilan tinggi agama. Sementara yang lainnya, belum maksimal fasilitas aparat penegak hukum di Malut. “Tentunya ke depan, tidak perlu serentak, pindahkan satu-satu dulu tapi lengkap.

Kalau ini dibangun gedung tapi perumahaninya tidak ada, siapa yang mau ke sana?" Katanya.

Desmond mengungkapkan kondisi tersebut terbengkalai sejak tahun

2004. Artinya hampir 11 tahun kondisinya memprihatinkan. "Tentunya kedepan, kita akan mengkoordinasikan ini dengan instansi Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan itu semua

juga dengan Menteri Keuangan dan Bapennas, agar ada skala prioritas untuk kelengkapan-kelengkapan itu," paparnya. (as)



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonon Daulay, bersama Kepala BNPB, Syamsul Maarif menyerahkan 103 unit rumah korban Sinabung

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonon Daulay, bersama Kepala BNPB, Syamsul Maarif Selasa (5/5) menyerahkan 103 dari 370 unit rumah tahap pertama bagi korban erupsi gunung Sinabung yang direlokasi dari desa Bakerah di Siosar, Kecamatan Merk, Kabupaten Karo Sumatera utara.

Pembangunan rumah akan dilanjutkan untuk merelokasi penduduk yang berasal dari desa Simacem dan Suka Meriah. Total jumlah rumah yang direncanakan dibangun adalah 2.053 yang akan dibangun secara bertahap pada tahun ini.

"Erupsi gunung Sinabung telah menelan korban jiwa dan harta benda. Masyarakat tentu sangat berduka atas kehilangan yang menimpa mereka, dan Pemerintah tidak boleh alpa dan absen dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat khususnya yang terkena bencana alam, seperti erupsi gunung Sinabung. Dalam konteks itu, sudah pada tempatnya jika pemerintah memberikan perhatian khusus bagi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Karo," papar Saleh.

Komisi II DPR Tinjau Lokasi Lahan IPDN Kampar

Komisi II DPR meninjau lokasi lahan IPDN Kampar untuk mengetahui kondisi lahan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, Pekanbaru, Riau yang diperuntukkan sebagai lokasi Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang sekarang sudah berdiri berada di Kabupaten Rokan Hilir di rencanakan akan berpindah ke Kabupaten Kampar, dengan pertimbangan lebih dekat dengan kota Kabupaten," kata Ketua tim Kunker Komisi II DPR ke Pekanbaru, Lukman Edy (F-KB) baru-baru ini.

Sebelumnya lokasi kampus IPDN tersebut sudah lama digadang-gadang akan dibangun di Kabupaten Kampar akan tetapi Kampus IPDN dibangun di Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Kabupaten Kampar dinilai lebih strategis

103 Unit Rumah Diserahkan Kepada Korban Sinabung

Selain rumah dan sarana sosial tambahnya, masyarakat di daerah erupsi gunung Sinabung juga kehilangan lahan pertanian mereka. Akibatnya, roda perekonomian masyarakat belakangan ikut terganggu. "Perlu perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah," kata Saleh.

Oleh karena itu, menurut Politisi dari Fraksi PAN Dapil Sumut II ini sesungguhnya tugas pemerintah tidak hanya relokasi. Tetapi lebih dari itu, bagaimana agar masyarakat yang direlokasi tersebut bisa kembali hidup seperti biasa dan bisa mencari nafkah sebagaimana masyarakat lainnya yang tidak ditimpa musibah.

Dikatakan saleh, Komisi VIII akan memberikan dukungan penuh kepada BNPB dalam penanganan korban-korban bencana di tanah air. Untuk itu, ia berharap agar rencana program pemerintah terkait hal ini disampaikan ke DPR. Dengan begitu, program tersebut bisa diagendakan dan dianggarkan sesuai dengan skala prioritasnya.

Dalam acara penyerahan rumah tersebut selain dihadiri Kepala BNPB, Syamsul Maarif, juga hadir Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya, Gubernur Sumut, Pangdam I Bukit Barisan, dan Kapolda Sumut. (Ayu)

lokasinya tidak terlalu jauh dari Ibukota Propinsi Riau, Pekanbaru dibanding Kabupaten Rokan Hilir, dan tidak hanya itu, Kabupaten Kampar telah menyediakan lahan seluas kurang lebih 200 hektar yang nantinya sebagai lokasi berdirinya Kampus IPDN tersebut.

Wacana ini sepertinya sudah akan segera terealisasi yaitu pada tahun 2016, karena anggota Komisi II DPR telah meninjau langsung ke lokasi lahan yang terletak di Kecamatan Tambang tepatnya di desa Kuala Nenas.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Lukman Edy mengakui, bahwa lokasi yang telah disiapkan oleh Pemkab Kampar memang sangat strategis karena untuk mencapai ke bandara hanya diperlukan waktu kurang dari 20 menit dan letaknya tepat dipinggir jalan. "Hasil ini akan kami sampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo seputar solusi permasalahan tersebut," ujar Lukman.

Pada saat berdialog dengan Bupati Kampar salah satu Anggota Komisi II DPR Suasana Dachi (F-Gerindra) menanyakan kepada warga yang sebelumnya sebagai pemilik tanah sebelum dibebaskan oleh Pemkab Kampar. Pasalnya, sebagian warga mengeluhkan lambannya pembangunan kampus tersebut.



“Lihat Bapak tua itu yang dulu mempunyai tanah ini, dulu kata bapak ini rela menjual tanahnya lantaran akan dibangun kampus, tapi kenapa sampai sekarang belum juga dibangun, lihatlah kekecewaan bapak itu, maka sekarang harus terealisasi,” ujar Suasana Dachi.

Rombongan Tim Kunjungan Kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy (F. PKB) dan didampingi beberapa orang anggota diantaranya Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman sebagai Wakil Ketua Tim (F. PG), Ahmad Riza Patria sebagai wakil Ketua Tim (F.P Gerindra), Komaruddin Watubun (F.PDIP), Diah Pitaloka (F.PDIP), Adian Yunus Y Napitupulu (F.PDIP), Charles J Mesang (F.PG), Azikin Solthan (F.P Gerindra), Suasana Dachi anggota (F.P Gerindra), Yandri Susanto anggota (F. PAN), Zainul Arifin (F. PKB), Syarif Abdullah Alkadrie (F. Nasdem), dan Rufinus H Hutahuruk (F. Hanura). (spy)



Tim Kunker Komisi II DPR meninjau lokasi pembangunan IPDN Pekanbaru, Riau

Komisi V Berharap Bandara Ahmad Yani Semarang Berprestasi

Anggota Komisi V DPR RI Roem Kono berharap Bandara Ahmad Yani Semarang dapat berprestasi seperti halnya Bandara Ngurah Rai dan Bandara Sepinggan yang masuk 10 besar bandara di dunia.

“Ini harus menjadi tantangan PT Angkasa Pura I untuk bisa masuk 10 besar bandara di dunia seperti halnya Bandara Ngurah Rai dan Sepinggan. Karena Semarang merupakan jantung daripada kota besar di Jawa dan bandara ini menjadi ikon yang dapat membanggakan masyarakat Semarang,” kata Roem Kono saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR dengan PT Angkasa Pura I di VIP Bandara Ahmad Yani di Semarang, Rabu (28/5/2015)

Roem mengapresiasi pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang. Politisi Partai Golkar ini mengingatkan pentingnya *maintenance*. “*Maintenance* menjadi penting karena apapun yang dibangun apabila *maintenance* kurang, maka bandara itu akan kehilangan citranya,” tegasnya.

Senada dengan Roem, Anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan Joseph Umarhadi mengapresiasi pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang yang menurut rencana akan selesai di 2017. Namun ia juga menyatakan kekecewaannya, mengapa baru sekarang ini dibangun dan mempertanyakan apa yang menjadi

kendalanya.

“Padahal Bandara Semarang ini sudah cukup lama menghadapi persoalan seperti yang disampaikan sudah sangat padat dan sudah sangat tidak *representative*,” imbuh Joseph.

Menurutnya, dulu ketika kita mulai merencanakan anggarannya tidak sampai Rp 1,7 Triliun, masih dibawah Rp 1 Triliun. Tapi karena terlambat anggaran menjadi Rp 1,7 Triliun.

“Keterlambatan itu membuat kerugian kita cukup besar dan tentunya saya ingin bertanya sebetulnya kendala-kendala apa sehingga terlambat membangun. Ini menjadi suatu pelajaran bagi kita kalau persoalan yang kita hadapi kemarin bisa segera diselesaikan, tidak akan seterlambat ini” ujarnya.

Sementara, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN Bakri HM mengingatkan dalam pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang harus ada disain lokalnya.

“Secara interior bagus dan modern tapi jangan lupa desain-desain lokal seperti ukiran Jepara khas Jawa. Karena bagaimana pun juga kalau bukan kita siapa lagi. Sebagaimana kita ketahui bandara-bandara yang dibangun PT Angkasa Pura I dan II banyak meninggalkan ciri-ciri daerah. Karena Semarang sebagai jantungnya Jawa harus memikirkan itu,” papar Bakri.

Sebelumnya dalam kesempatan



Anggota Komisi V DPR Roem Kono

yang sama, Direktur Teknik PT Angkasa Pura I Polana Pramesti menjelaskan tentang pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang. Saat ini Bandara Ahmad Yani kondisinya *lack of capacity*.

Rencana pembangunan Bandara Ahmad Yani Semarang terbagi dalam empat paket. Paket 1, pekerjaan pemataan lahan dan jalan akses. Paket 2, pekerjaan apron. Paket 3, pekerjaan pembangunan gedung terminal dan paket 4, pekerjaan pembangunan bangunan penunjang.

Bandara Ahmad Yani Semarang bekerjasama dan memanfaatkan lahan TNI AD untuk membangun terminal

dan menggunakan mekanisme kontribusi tetap. Bandara Ahmad Yani merupakan bandara pertama yang

menerapkan konsep *green airport*, dan targetnya adalah *gold certificate*. (sc)

Komisi VII Tinjau Pertambangan Batubara dan PLTU Kalsel



Tim Kunker Komisi VII DPR meninjau pertambangan batubara di Warukin Tanjung Tabalong, Kalsel

Komisi VII DPR RI dalam masa reses kali ini meninjau pertambangan batubara di Warukin Tanjung Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Tim kunjungan kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Zairullah Azhar dan diikuti lima belas anggota Komisi VII lainnya.

Kunjungan kerja ini merupakan salah satu fungsi DPR melakukan pengawasan, terutama dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah, diantaranya terkait sektor pertambangan mineral dan batubara.

Dalam kunjungan ini, Rabu (29/4) Komisi VII mengadakan pertemuan dengan Gubernur Kalsel, DPRD, Wapolda Provinsi Kalsel, Wali Kota dan Bupati se-Kalimantan Selatan, Bapedalda, Kementerian ESDM, Ke-

menterian LHK, Kementerian Ristek, PT Pertamina (Persero), PT. Pertamina EP, BPH Migas. SKK Migas, Dinas Pertambangan, PT. Adaro Energy Tbk, PT. Meratus Jaya Iron dan Stell.

Zairullah menjelaskan, PT. Adaro Energy Tbk termasuk salah satu yang langsung ditinjau Komisi VII DPR. “Pada tanggal 5 Pebruari lalu, Komisi VII juga telah melakukan kunjungan spesifik diantaranya mengundang PT. Adaro Energy Tbk,” kata Zairullah.

Putera Daerah Kalimantan Selatan ini menjelaskan, pertemuan kali ini sifatnya lebih pada tindak lanjut hasil kunjungan spesifik bulan lalu, diantaranya mengenai perkembangan pembangunan PLTU Mulut Tambang, komitmen PT. Adaro Energy Tbk untuk membangun jalan serta persoalan lingkungan hidup pasca tambang dan

implementasi kepedulian sosial.

Pada kesempatan itu, Anggota dari Partai Nasdem Kurtubi mempertanyakan pihak Adaro, kontribusinya terhadap masyarakat Kalimantan Selatan, berapa pekerja asing dan tenaga lokal serta tenaga ahli yang ada di perusahaan tersebut.

Menurut Presiden Direktur Adaro Chia Ha Hoo, tenaga kerja per Desember 2014 berjumlah 23.212 orang dan mempekerjakan 52% tenaga lokal dan tenaga asing yang bekerja sekitar +10 orang itupun ditempatkan sebagai Top Manager yang lainnya di luar Provinsi Kalsel.

“PT. Adaro Energy Tbk adalah perusahaan yang cukup berhasil dan harapan besar bahwa 30 tahun kedepannya akan tetap bertahan dibidang pertambangan dan masih tetap beroperasi,” kata Chia.

Menjawab pertanyaan Kurtubi, Chia mengatakan, seiring dengan berjalannya produktivitas, PT. Adaro melaksanakan beberapa program untuk masyarakat. “Program tersebut antara lain di bidang pertanian, kehutanan, kesehatan dan bea siswa,” kata Presiden Direktur Adaro.

Seusai mendapat penjelasan singkat dari pihak Adaro Energy, rombongan langsung meninjau aktivitas tambang yang beroperasi pada bulan Juli 2005.

Rombongan Tim Komisi VII DPR RI yang sedianya akan mengadakan pertemuan dengan Direksi PT. Meratus Jaya Iron Stell dibatalkan karena cuaca buruk. (hr) foto: eka hindra/parle/hr

Perubahan Status STAIN Babel Harus Dibarengi Pengadaan Fasilitas Umum

Anggota Komisi VIII DPR RI, Arzeti Bilbina mendukung perubahan status STAIN Abdurrahman Siddik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi IAIN dengan beberapa catatan.

“Kami mendukung perubahan atau alih status STAIN ini

menjadi IAIN, karena memang untuk sebuah provinsi yang masih memiliki lahan kosong yang cukup luas, Kepulauan Bangka Belitung seharusnya sudah memiliki IAIN. Namun luas area saja tentu tidak cukup,” ungkap Arzeti dalam kunjungan kerja Komisi VIII ke Provinsi Kepulauan Bangka



Tim Kunker Komisi VIII DPR saat pertemuan dengan Jajaran Rektorat dan mahasiswa STAIN Abdurrahman Siddik Babel

Belitung, Senin (27/4).

Dilanjutkannya, untuk sebuah perguruan tinggi dan sekolah tidak hanya dibutuhkan luas area, tenaga pendidik dan fasilitas di dalam kampus lainnya, namun yang juga harus dipikirkan adalah fasilitas umum seperti transportasi menuju kampus.

Pasalnya, Zeti begitu anggota Komisi VIII ini biasa disapa, melihat di sekolah tinggi tersebut belum ada alat transportasi umum. Hal ini menyulitkan mahasiswi ketika ingin

ke kampus. Terlebih lagi di lokasi kampus tersebut masih terdapat perkebunan sawit yang notabene sangat sepi. Kondisi tersebut dinilainya cukup beresiko terhadap keamanan para mahasiswi khususnya.

“Tadi saya sempat mendapat informasi bahwa pulang kuliah jam enam sore, dan tidak ada transportasi umum. Padahal banyak mahasiswa yang belum memiliki kendaraan pribadi. Dan para mahasiswi mengaku kalau keluar kampus rombongan, bahkan mereka membekali diri mereka dengan beladiri karate. Karena memang situasi dan kondisi disini yang masih banyak perkebunan kosong kurang *safety* untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswi,” papar model sekaligus Politisi dari Fraksi PKB ini.

Ia berharap agar perubahan dan pengalihstatusan STAIN menjadi IAIN ini juga dibarengi dengan fasilitas umum lainnya seperti pengadaan angkutan atau transportasi umum yang melewati kampus tersebut. Tidak hanya itu, keamanan para mahasiswa khususnya mahasiswi dari berbagai tindak kejahatan dan pelecehan pun harus terjamin.

Untuk mewujudkan semua itu menurut Zeti, pihak kampus harus bekerja sama dengan Pemda setempat, termasuk Dinas Perhubungan dan Kepolisian serta seluruh elemen masyarakat. Dengan begitu para mahasiswa dapat lebih konsentrasi dalam menuntut ilmu, tanpa harus takut atau khawatir dengan keselamatannya. (Ayu)

Jembatan Soekarno di Sulut Bisa Rampung Tahun ini

Setelah mengalami banyak kendala, pembangunan jembatan Soekarno di Manado, Sulawesi Utara (Sulut) bisa segera dirampungkan tahun ini. Jembatan yang dicanangkan sejak tahun 2013, sempat menghadapi banyak kendala, baik anggaran dan teknis.

Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow (dapil Sulut) menyampaikan hal tersebut di Manado, Sulut, Selasa (28/4). Yasti mengungkapkan, kendala yang menghadang pembangunan jembatan Soekarno seperti beruntun tak ada habisnya. Kendala pertama yang dihadapi adalah soal anggaran dari APBN.

Pemerintah, nilai Yasti, tidak serius menganggarkan jembatan tersebut. Dari ratusan miliar anggaran yang disetujui dalam APBN, hanya 5 miliar per tahun diberikan. Penyicilan anggaran tersebut, tentu menyulitkan pembangunan. Sejak diresmikan pembangunannya pada era Presiden Megawati hingga sekarang, jembatan Soekarno terbengkalai. Kini, ketika Komisi V terus mendorong lewat politik anggaran, jembatan itu segera bisa diselesaikan.

“Saya dilantik jadi anggota DPR RI tahun 2009. Lalu pada 2010 pengang-

garannya saya pacu, karena sayang dari 2003 sampai 2010 itu anggarannya dicicil Rp5 miliar. Pemerintah enggak serius. Masa membangun jembatan yang anggarannya Rp400-500 miliar, tiap tahun dikasih 5-10 miliar. Ya *mending* enggak usah. Jadi, pada 2010 kebetulan saya jadi ketua komisi, saya pacu itu agar cepat selesai,” aku politisi PAN tersebut.

Yasti lalu mengungkap kendala-kendala yang dihadapi kemudian. Dimulai dari masalah internal Hutama Karya sebagai kontraktor pembangunan jembatan ini. BUMN ini kesulitan likuiditas sehingga tak bisa menyerap anggaran. Setelah selesai masalah di Hutama Karya, Pelindo melakukan komplain lantaran ketinggian jembatan yang membelah Pelabuhan Manado itu masih terlalu rendah, sehingga dikawatirkan menyentuh puncak kapal yang melintas.

Akhirnya, jembatan dibongkar kembali dan dilakukan peninggian. Ketika pembangunan jembatan sedang dilanjutkan, tiba-tiba jembatan di Kutai Kartanegara (Kukar), Kaltim roboh. Desain jembatan Kukar sama persis dengan jembatan Soekarno di Manado, yaitu



Anggota Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow

menggunakan sistem *cable stand*. Jembatan Kukar dan Soekarno sama-sama dikerjakan oleh Hutama Karya. Tentu ini membuat ragu kontraktor, karena khawatir jembatan ini juga tidak tahan lama dan roboh seketika.

Lalu, lanjut Yasti, didatangkanlah konsultan internasional untuk menganalisis kekuatan desain jembatan Soekarno tersebut. Itu tentu butuh waktu dan anggaran lagi. “Jadi, kendalanya adalah anggaran, intenal BUMN, dan kasus robohnya jembatan di Kukar. Ini, kan, jembatan kedua setelah Kukar dengan desain yang sama. Tahun-tahun pertama terkendala anggaran. Enam tahun terakhir banyak menghadapi kendala teknis,” papar Yasti. (mh) foto: husen/parle/hr

Komisi IX DPR Soroti Kondisi BLK Sumbar

Komisi IX DPR RI menyoroti Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Sumatera Barat. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena, kondisi BLK di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan.

Demikian diungkapkan Ermalena saat pertemuan dengan jajaran Gubernur Sumatera Barat, dalam serangkaian kunjungan kerja Komisi IX DPR ke Provinsi Sumatera Barat, Senin (27/4).

“Kondisinya sudah tertinggal semua. Baik itu dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun peralatan yang dimiliki, sehingga perlu untuk direvitalisasi,” ungkap Ermalena, saat berdialog de-



Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena

ngan Gubernur Sumbar di Aula Kantor Gubernur.

Kondisi ini juga tidak jauh berbeda dengan BLK yang ada di Sumbar. Bangunan BLK sudah rapuh, sarana prasarannya juga sangat memprihatinkan. Menurut Ermalena, revitalisasi BLK ini diperlukan, untuk peningkatan kualitas kerja juga sebagai salah satu langkah untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015.

Selain itu, kata Ermalena, pelatih di BLK juga harus ditingkatkan sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. (andri) foto: andri/parle/hr



Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan berdialog dengan siswi SMP di Papua

Anggota Komisi X DPR dari FPDIP Sofyan Tan berharap dunia pendidikan bisa menjangkau daerah-daerah terpencil. Sebab, selama ini guru-guru sangat sedikit yang mengajar di lokasi pedalaman ataupun di daerah pegunungan.

“Dunia pendidikan harus mampu menjangkau daerah-daerah terpencil, sebab selama ini guru-guru enggan ditempatkan di daerah terpencil ataupun pedalaman dan pegunungan,” kata Sofyan Tan kepada Parlemen.

Khusus untuk Provinsi Papua, ia menyarankan agar Universitas Cenderawasih secara khusus menjangkau putra-putri terbaik di daerah untuk dijadikan guru dengan memberikan insentif yang lebih besar. “Pembangunan sumber daya manusia itu titik poin yang sangat besar agar Papua ini bisa

Dunia Pendidikan Harus Jangkau Daerah Terpencil

lebih maju, jadi bukan hanya membangun infrastruktur tetapi yang paling penting adalah membangun sumber daya manusia,” kata Sofyan.

Saat mengunjungi perpustakaan daerah, pihaknya merasa miris dengan kondisi yang ada dalam perpustakaan tersebut. “Perpustakaan adalah sumber ilmu bagi generasi muda di Papua, untuk itu pembenahan terhadap perpustakaan harus menjadi prioritas pembangunan di Papua,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam masa reses ini, Komisi X DPR melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Papua. Kunjungan kerja yang dipimpin Ketua Tim Kunker Komisi X DPR Ridwan Hisyam itu diikuti sejumlah anggota Komisi X DPR diantaranya; Asdi Narang (FPDIP), Junico BP Siahaan (FPDIP), My Esti Wijayati (FPDIP), SB Wiryanti Sukamdani (F-PDIP), Dwita Ria Gunadi (F-PGerindra), Sri Mellyana (F-PGerindra), Yayuk Basuki (F-PAN), Laila Istiana DS (F-PAN), Krisna Mukti (F-PKB), Lathifah Shohib (F-PKB), Surahman Hidayat (F-PKS), SY Anas Thahir (F-PKS), Anwar Idris (F-PPP), Dadang Rusdiana (F-PHANURA). (nt) foto: nita/parle/hr

Pelaksanaan UN SMP Tidak Ada Kendala Berarti

Pelaksanaan Ujian Nasional tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2015 yang digelar pekan ini berjalan lancar, dan tidak ada kendala berarti. Bahkan UN berbasis komputer atau CBT lebih disenangi anak didik karena lebih efisien dan meminimalisir kebocoran.

Demikian kesan yg didapatkan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR yang dipimpin Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya, ketika memantau langsung pelaksanaan UN di SMP Negeri 1 Gresik, SMP Muhammadiyah 12 dan SMP Luar Biasa Gresik, Jawa Timur, Kamis (7/05).



Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya

Bitung Harus Jadi Pelabuhan Utama

Melihat letaknya yang sangat strategis di timur Indonesia, Pelabuhan Bitung yang berada di Sulawesi Utara (Sulut) harus dijadikan pelabuhan utama. Lokasinya juga sangat ideal, karena bisa menjangkau pulau-pulau terpencil di kawasan timur Indonesia.

Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V ke Sulut, Lasarus (dapil Kalbar) menyampaikan hal tersebut di Pelabuhan Bitung, Selasa (28/4). “Kita dorong Pelabuhan Bitung ini menjadi salah satu pelabuhan utama di Indonesia, karena letaknya yang strategis. Alam sudah menciptakan lokasi ini begitu ideal untuk dijadikan pelabuhan,” ungkap Wakil Ketua Komisi V ini.

Politisi PDI Perjuangan ini sedikit memberi catatan terhadap kapasitas pelabuhan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperluas lahan agar kapasitas container bisa lebih banyak yang tertampung di pelabuhan ini. “Jadi, tidak mungkin bisa ideal kalau pelabuhannya bagus tapi lapangan kontainernya terbatas,” ujarnya.

Pelabuhan Bitung yang berada di ujung timur Sulut, dikelola oleh Pelindo IV. Panjang alur pelayarannya 9 mil dengan lebar 800 mil. Ada banyak bidang usaha yang digarap di

“Kendala UN khususnya UN CBT diantaranya jumlah komputer terbatas dan listrik sehingga harus menyediakan genset. Di SMP 1 Gresik hanya memiliki 50 komputer, padahal jumlah siswanya sebanyak 269, sehingga harus pinjam ke sekolah lain,” jelas Riefky.

Meski baru dua SMP di Gresik yang melaksanakan UN CBT sebagai *pilot project*, namun secara umum, Politisi Demokrat ini menilai UN berjalan baik.

“Justru yang khawatir malah para orang tua. Namun dengan adanya *try out* siswa lebih siap dan orang tua bisa memahaminya,” imbuh Riefky.

Politisi asal Dapil Aceh I ini berharap, terkait masih kurangnya infrastruktur penunjang UN, akan segera dibahas dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada akhir bulan ini, termasuk evaluasi UN 2015. Ia juga berharap, UN CBT dapat diterapkan di sekolah tingkat provinsi di seluruh Indonesia. (mp) foto: naefuroji/parle/hr



Wakil Ketua Komisi V DPR Lasarus di ruang kendali kapal penumpang

pelabuhan tersebut, misalnya pelayanan kapal, pelayanan barang, pelayanan penumpang, dan persewaan alat mekanik.

“Yang jelas, kunjungan kerja kita kali ini menghimpun dan menampung seluruh masukan dari *stakeholder* perhubungan, yang nantinya kita bawa ke komisi untuk jadi bahan diskusi kita untuk membenahi kondisi yang ada agar menjadi lebih baik,” ujar Lasarus. (mh) foto: husen/parle/hr

Komisi IX DPR Tinjau RS Stroke Nasional Bukit tinggi

Rombongan anggota Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi, Selasa (28/4). Hari kedua yang dikunjungi Komisi IX itu adalah Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena menjelaskan, kedatangan rombongan Komisi IX itu untuk melihat secara langsung kondisi RSSN Bukittinggi, baik menyangkut infrastruktur, dan peralatan yang ada di RSSN tersebut.

Dijelaskannya, setelah dicanangkan sebagai rumah sakit stroke nasional, RSSN Bukittinggi dari waktu ke waktu terus berkembang, khususnya kedatangan pasien dari berbagai provinsi di Sumbar.

Ditambahkan Direktur RSSN Bukittinggi dr. Suryo Purhanto, perkembangan itu sudah diantisipasi sejak beberapa waktu lalu dengan penambahan berbagai jenis peralatan serta infrastruktur lain, seperti gedung kantor maupun



Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalina berdialog dengan salah satu pasien di RS Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi

elayanan. Namun percepatan pengembangan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat.

Sejalan dengan upaya perluasan areal ke lokasi tanah milik Kodim 0304/Agam, yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, Suryo menyebutkan, pihaknya juga telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Kesehatan RI untuk mengubah nama rumah sakit dari stroke yang terkesan agak menakutkan menjadi rumah sakit pusat otak untuk wilayah Barat Indonesia.

“Meski perubahan namanya bakal disetujui menjadi Rumah Sakit Pusat Otak, namun pelayanan terhadap pasien

penderita stroke tetap menjadi andalan pelayanan kami,” tutur Direktur Utama RSSN.

Menanggapi perkembangan tersebut, pejabat dari kementerian Kesehatan yang ikut dalam rombongan menjelaskan dukungan terhadap RSSN. Namun diakui untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam peningkatan pelayanan tersebut tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Kesehatan saja.

Menurut pejabat Kemenkes, keberadaan RSSN selain didukung dengan ketersediaan tenaga medis dan sarana pelayanan, juga disebabkan oleh posisi dan kondisi kota Bukittinggi yang sangat mendukung.

Mendapatkan penjelasan dari pihak RSSN maupun Kemenkes beberapa wakil rakyat DPR-RI dari Komisi IX yang dipimpin Ermalina, menanggapi dengan baik dan berjanji untuk mengakomodir tuntutan kebutuhan RSSN tersebut, khususnya dalam penyediaan dana untuk mewujudkannya.

Dari dialog yang dilakukan antara jajaran RSSN dan Kemenkes, para wakil rakyat tersebut mengakui bahwa pada tahun 2015, termasuk pada APBN Perubahan mendatang, anggaran untuk Kementerian Kesehatan jauh meningkat.

Terhadap usaha perluasan areal RSSN, Ermalina yang ditanya sejauhmana kemungkinan dukungan wakil rakyat mengakui belum tahu duduk persoalan sesungguhnya. Kalau memang perlu dukungan dari DPR RI, Erma menyebutkan akan mengusahakan.

“Sebelum memberikan persetujuan, tentu saja kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana konsep dan proses yang telah dilakukan,” tegasnya sambil berharap semua pihak ikut mendukung, dan memelihara RSSN sebagai asset daerah dan nasional. (andri) foto: andri/parle/hr

BPTUHPT Padang Mengatas, Kebanggaan Sumatera Barat



Komisi IV DPR RI meninjau Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) di Padang

Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) di Padang Mengatas, Kabupaten 50 Kota, Sumbar. Balai yang terletak di ketinggian 700-900 meter di atas permukaan laut, di kaki Gunung Sago ini dalam waktu 4 tahun berhasil menjadi yang terbaik di Indonesia.

“Kita sudah melihat langsung keberhasilan BPTUHPT di Padang Mengatas bagus sekali, ini kebanggaan Sumatera Barat. Harus bisa menjadi model nasional, pemasok bibit unggulan, kalau ini terwujud kita beri dua jempol,” kata anggota Komisi IV I Made Urip saat melakukan kunjungan kerja, Rabu (29/4).

Politisi dari Fraksi PDIP ini menyebut sektor pembibitan sapi ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi sehingga



dari sejumlah BPT seperti di Sumbawa, Sumsel, Bali, Batu Raden belum banyak yang berhasil. Ia berharap capaian ini bisa menambah optimisme pemerintah dan DPR dalam mencapai target swasembada daging sapi dan lebih jauh meraih kedaulatan pangan.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Tim Kunker dari Fraksi Partai Golkar Hardisoesilo menyebut upaya membangun balai dengan luas 280 hektar seperti di Padang Mengatas sebenarnya sudah menjadi amanat UU. Akan tetapi menurutnya upaya ini belum didukung *political will* yang sungguh-sungguh dari pemerintah.

“Dalam UU Peternakan sudah ada aturan yang mengarah kesitu dan kita punya lahan misalnya di pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita harapkan dalam RUU Karantina yang sudah masuk Prolegnas jangka

panjang, kebijakan ini bisa dipertegas,” papar dia.

Ia juga mengapresiasi BPTUHPT Padang Mengatas berhasil membangun pemahaman baru ditengah masyarakat yaitu sentra sapi itu dekat dengan kandang yang sempit, kotor dan becek. Di balai modern ini sapi dilepas di alam bebas, di padang rumput yang terawat dengan baik sebagai pakan ternak yang kandungan gizinya terukur.

Kunjungan Kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Herman Khairon melihat pengembangan pakan unggul seperti rumput Legum atau *Leguminosa Styloshantes* yang memiliki kandungan protein mencapai 24 persen. Kandungan ini jauh lebih tinggi dibanding rumput gajah yang hanya 9 - 10 persen.

Kepala BPTUHPT Padang Mengatas Ir.Sugiono, MP memaparkan butuh

perjuangan untuk bisa bangkit kembali setelah dijarah masyarakat pasca reformasi 1997. Waktu itu peternakan yang dirintis sejak era kolonial Belanda ini, hanya memiliki 70 ekor sapi dan sebagian lahan yang sudah bersertifikat dikuasai masyarakat.

Ketika mulai memimpin tahun 2011 lalu, sapi yang dimiliki hanya 144 ekor. Dengan kegigihan lahan yang dikuasai tanpa izin masyarakat tahun 2013 berhasil diambil kembali. Tahun 2015 sapi sudah berkembang menjadi 1000 ekor dan 300 ekor diantaranya dalam keadaan bunting. “Saya mengapresiasi karyawan saya yang sebagian besar adalah PNS berdedikasi, berhasil menata ulang balai ini. Mereka bekerja tak kenal waktu, siap dipanggil pukul 2 pagi terutama kalau ada sapi yang mau melahirkan,” ungkapnya. (iky) foto: ib-nur khalid/parle/hr

Komisi III DPR Temui Nenek Terpidana Terjebak Narkoba



Tim Kunker Komisi III DPR berdialog dengan nenek terjerat kasus narkoba di Lapas Kelas IIA Kendari

Setelah menggelar pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah (KaKanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim Kunker Komisi III yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap melakukan sidak ke Lapas Kelas II A Kendari, Rabu (29/04).

Dalam sidak tersebut Komisi III menemukan satu kasus dimana ada seorang nenek yang berusia 73 tahun menjadi terpidana kasus narkoba di Lapas II A Kendari. Nenek yang bernama Hj Reni ini dihadapan Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap mengaku dijebak atau menjadi korban oleh pengedar narkoba jenis sabu. Menurut Reni pemilik sabu melarikan diri ke Malaysia yang hingga kini belum ditangkap.

Nenek yang sedang mengalami stroke ringan itu mengaku jika dirinya tidak mengetahui barang yang harus dia antarkan itu ternyata narkoba.

Reni mengaku bahwa dia ditiptikan barang oleh Bulang dan diantarkan mantan menantunya ke Kendari, setelah itu disuruh naik ojek oleh menantunya untuk mengantarkan barang tersebut ke seseorang dia sendiri tidak mengenalinya dan tidak mengetahui alamat tujuannya. Singkat cerita nenek Reni mengaku belum sempat tiba ditempat tujuan namun sudah ditangkap oleh 4 orang petugas BNN. Reni mengaku tidak menerima uang dari Bulang dari hasil mengantarkan narkoba.

Saat penangkapan, suaminya sedang melaksanakan ibadah haji. Oleh pengadilan Negeri Kendari, nenek yang memiliki rumah makan Teluk Bone di Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur, divonis 4,3 tahun penjara.

“Sudah setahun lebih saya jalani hukuman, tidak banding. Saya terima saja putusan hakim, dan saya tidak ada pengacara,” papar Reni.

Menanggapi temuan saat sidak ke Laps Kelas II A Kendari, anggota Komisi III Ruhut Sitompul mengatakan, ibu ini diperalat. Awalnya, yang bersangkutan tidak dikenai bayaran dan hanya disuruh mengantarkan narkoba.

Menurut Ruhut, seandainya nenek itu didampingi kuasa hukum, bisa mengajukan banding dan kasasi. “Kalau saat itu ibu didampingi pengacara bisa mengajukan banding. Kan ada *novum* atau bukti baru. Tapi kalau sudah terima putusan dijalani dengan sabar ya, Bu,” tambah Ruhut. (skr) foto: singgih/parle/hr



Tim Kunker komisi VIII DPR RI berdialog dengan warga KUBE (Kelompok Usaha Bersama) peternak kambing, Desa Rantedoda, Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (28/4) Foto: Rizka/Parle/HR



Tim Kunjungan kerja Komisi II DPR RI meninjau Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swasembada (P4S) Pekanbaru, Riau, Selasa (28/04) Foto: Supri/Parle/HR



Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi Zairullah Azhar meninjau lokasi tambang batubara PT Adaro di Tabong, Kalimantan Selatan, Senin (27/04) Foto: Eka Hindra/Parle/HR



Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke SMA YPPK Taruna Dharma Kotaraja Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (28/04). Foto: Nita/Parle/HR



Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI menuju objek wisata pulau Asei Besar di Danau Sentani, Rabu (29/04) Jayapura, Provinsi Papua. Foto: Nita/Parle/HR